



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

ORASI ILMIAH

Wisuda Periode I Tahun 2013

*"Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah
Kebangkitan Nasional"*

Oleh:

Dr. Effendi Wahyono, M.Hum

D
13/60004

*Balai Sidang Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, 2 April 2013*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

13

60001

Dokumen



UNIVERSITAS TERBUKA

Making Higher Education Open to All

ORASI ILMIAH

Wisuda Periode I Tahun 2013

*"Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah
Kebangkitan Nasional"*

Oleh:

Dr. Effendi Wahyono, M.Hum

*Balai Sidang Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, 2 April 2013*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

AKTUALISASI NILAI-NILAI SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL

Dr. Effendi Wahyono, M.Hum.

Kepada: Yth. Ketua dan anggota Senat Universitas Terbuka
Yth. Rektor Universitas Terbuka
Yth. Para Wisudawan yang berbahagia
Yth. Para Undangan sekalian

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Perkenankan saya membawakan orasi ilmiah dengan judul Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah Kebangkitan Nasional, semoga dapat menjadi bekal bagi setiap wisudawan dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat, Nusa, dan Bangsa.

Lahirnya Kebangkitan Nasional

Ernest Renan¹ mengatakan bahwa suatu bangsa atau nation lahir karena ada kehendak dari masyarakat yang hidup di dalamnya untuk hidup bersama. Kehendak untuk hidup bersama ini timbul dari nasib sejarah yang sama. Itu yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya kaum terdidik yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta (Batavia waktu itu), Surabaya, Bandung, Semarang pada awal abad ke 20. Mereka datang dari berbagai wilayah di Nusantara dengan berbagai latar belakang etnis seperti Aceh, Melayu, Batak, Minang, Minahasa, Jawa, Sunda, Ambon untuk mengikuti pendidikan di Jakarta. Dalam suasana belajar, mereka dikenalkan kemajemukan budaya yang terpancar dari berpakaian, berbahasa, berbicara, dan bergaul.² Dalam kemajemukan budaya yang dirasakan, mereka hidup bersama dalam satu asrama, satu tempat kos, atau satu tempat diskusi, yang kemudian terbentuk

¹ Seorang sejarawan, filsuf, dan sastrawan Prancis yang hidup antara 1823-1892.

² Dalam pergaulan sehari-hari di asrama, mereka menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi kalau berbicara dengan teman seadaerah, mereka menggunakan bahasa daerah. Lihat Mohamad Roem, "Haji Agus Salam" dalam *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984

satu komunitas intelektual muda. Mereka adalah kelompok elit baru yang tumbuh dari hasil pendidikan.³

Sebagai intelektual muda yang peka dengan keadaan zaman, mereka memiliki kegelisahan yang sama, mereka merasakan problem yang sama, yaitu sebagai bangsa terjajah yang ditindas oleh kekuasaan rezim kolonial. Di sisi lain, sebagai intelektual⁴ muda, mereka adalah pribadi yang bebas, yang memiliki kemerdekaan untuk berpikir, yang diilhami oleh bacaan mereka yang luas. Keadaan itu membangkitkan rasa solidaritas, dan kesadaran bahwa mereka adalah satu bangsa yang harus dapat melepaskan diri dari penjajahan untuk menjadi bangsa yang merdeka.

Perlawanan terhadap penjajah bukan baru terjadi pada awal abad ke 20. Jauh sebelum itu, berbagai suku bangsa di wilayah Nusantara sudah mengangkat senjata melawan penjajah. Dalam sejarah Indonesia kita telah dikenalkan berbagai perlawanan melawan penjajah. Kita telah mempelajari perlawanan berbagai anak bangsa melawan penjajah seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Patimura, Perang Aceh dan lain-lain. Tetapi perlawanan tersebut sifatnya lokal sehingga pemerintah kolonial dapat menumpasnya satu-persatu meskipun dengan biaya yang mahal.

³ Munculnya elit baru pada awal abad ke 20 akibat perluasan pendidikan dibahas oleh Robert van Niel dengan judul *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*, diterbitkan oleh Uitgeverij W. Van Hoeve, Den Haag tahun 1960, dan kemudian edisi Indonesia terjemahan Zahara Deliar Noer diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1984 dengan judul *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Kemudian Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite*. Heinemann Educational Books, Singapore, 1979, mengkaji dari sisi yang berbeda tentang munculnya elit berpendidikan Indonesia dalam birokrasi Hindia Belanda, dan bagaimana pemerintah Hindia Belanda membentuk pangreh praja menjadi birokrasi modern, dan bagaimana elit pangreh praja yang memasuki dunia birokrasi modern pada awal abad 20 ini dihadapkan pada dua hal yang berseberangan, antara gerakan kebangsaan yang menuntut Indonesia merdeka dengan pemerintahan kolonial yang semakin menekankan rasionalitas kepegawaian dalam rangka terciptanya *beambtenstaat*.

⁴ Pemahaman tentang intelektual di sini mengacu pada pendapat Sharif Shaary, dramawan Malaysia, yang mengatakan bahwa seorang intelektual adalah seorang pemikir yang sentiasa berpikir dan mengembangkan [serta] menyumbangkan ideanya untuk kesejahteraan masyarakat. Dia juga adalah seorang yang mempergunakan ilmu dan ketajaman pikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di mana dia hadir khususnya dan di peringkat globalnya untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran itu. Lebih daripada itu, seorang intelektual juga adalah seorang yang kenal akan kebenaran dan berani pula memperjuangkan kebenaran itu, meski bagaimanapun tekanan dan ancaman yang dihadapinya, terutama sekali kebenaran, kemajuan, dan kebebasan untuk rakyat."
<http://ms.wikipedia.org/wiki/Intelektual>

Apa yang terjadi ketika bangsa Indonesia memasuki abad ke 20 berbeda dengan zaman sebelumnya. Dari sejarah Indonesia kita mengetahui bahwa pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke 19 membuka berbagai sekolah. Semula kebutuhan pendidikan dirasakan oleh para pejabat kolonial untuk mendidik anak-anak mereka, tetapi kemudian dengan didorong kebijakan politik etis, dunia pendidikan terbuka untuk golongan pribumi, meskipun kran yang dibuka masih kecil sekali. Tidak semua anak pribumi dapat menikmati pendidikan. Pendidikan masih merupakan barang elit dan milik anak-anak golongan bangsawan, pangreh praja atau pejabat pribumi.⁵

Kebijakan politik etis yang dilatarbelakangi oleh merosotnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Hindia (baca Indonesia), tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada agenda tersembunyi di balik perluasan kesempatan pendidikan. Kepentingan kapitalis Eropa merupakan faktor dominan di balik kebijakan politik etis. Para pemilik modal Eropa memerlukan tenaga terdidik dari kalangan bangsa pribumi yang bergaji murah untuk dijadikan tenaga administrasi di perusahaan-perusahaan mereka. Dunia industri Barat juga menginginkan adanya pertumbuhan tingkat ekonomi bangsa pribumi supaya memiliki daya beli bagi produk industri yang dihasilkan. Karena adanya berbagai kepentingan di balik kebijakan tersebut, maka politik etis tidak menghasilkan apa yang diharapkan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kerajaan Belanda yang sejahtera.⁶

Sisi lain dari kebijakan politik etis adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Indonesia pada dekade awal abad ke 20. Perubahan yang sangat dirasakan adalah tumbuhnya kesadaran berbangsa. Pendidikan merupakan faktor utama tumbuhnya kesadaran berbangsa. Melalui pendidikan tertanam ide-ide kebebasan dan jiwa yang merdeka. Silalahi (1995: 11) mengibaratkan pendidikan yang diikuti oleh bangsa bumi putra pada awal abad ke 20 sebagai *national liberation movement*, yang melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kemudian mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

⁵ Pendidikan untuk kaum pribumi dibuka pada tahun 1892 dengan didirikan *Eerste Klasse School*, yang diperuntukkan bagi warga pribumi kelas atas, dan dua tahun kemudian dibuka pendidikan untuk golongan pribumi biasa atau kelas rendah melalui *Tweede Klasse School*. Pada tahun 1907 dibuka *Volksschool* atau sekolah rakyat dengan lama pendidikan tiga tahun dan kurikulumnya hanya untuk sekadar dapat membaca, menulis, dan berhitung. Meskipun demikian, untuk golongan bangsawan dan pejabat tertentu seperti anak bupati, patih, wedono, dapat mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah Belanda seperti *Europesche Lagere School* dan *Hogere Burgerschool*.

⁶ Gambaran detail tentang kelompok kepentingan dalam politik etis diurai oleh Elsbeth Locher-Scholten dalam bukunya *Ethiek in Fragmenten, Vijf Studies over Koloniaal Denken an doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942*. Utrecht: HES Publishers

Melalui pendidikan itulah embrio kebangsaan lahir di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Merekalah yang dapat memahami angin gerakan demokratisasi di Eropa. Mereka pula yang dapat mengikuti suasana internasional seperti munculnya ide-ide dan gerakan nasionalisme di berbagai negara di dunia, mereka juga yang dapat membaca ide-ide tentang revolusi dan gerakan pembebasan. Suasana internasional yang mereka pahami dan kualitas intelektual yang mereka miliki itulah yang mendorong bangkitnya kesadaran perlunya menjadi bangsa yang merdeka. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) pada umumnya memberikan inspirasi gerakan nasionalisme di Indonesia. Pengaruh besar dari gerakan nasionalisme Indonesia juga datang dari gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, dan gerakan-gerakan Nasionalisme di negara-negara tetangga seperti India dan Filipina (Kartodirdjo, 1993: 59). Sebagai gejala universal, gerakan nasionalisme di Dunia Ketiga merupakan kontra ideologi dari kolonialisme, sekaligus berfungsi sebagai simbol suatu identitas kolektif masyarakat yang berusaha melakukan liberasi dari penjajahan. Identitas kolektif tersebut pada hakikatnya menjadi pemicu lahirnya solidaritas nasional (kartodirdjo, 1993: xi)

Budi Utomo dan Bangkitnya Kesadaran Nasional

Meskipun banyak pro dan kontra, secara umum sejarah Indonesia mengartikan lahirnya Budi Utomo (BU) pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai awal dari bangkitnya kesadaran nasional.⁷ BU merupakan organisasi kemasyarakatan modern yang pertama kali didirikan oleh anak bangsa Indonesia⁸. Karena itulah hari kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai hari Kebangkitan Nasional.⁹

⁷ Istilah Kebangkitan Nasional digunakan untuk menyebut gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh pada dasawarsa pertama dan kedua abad ke 20. Pada periode tersebut tumbuh dan berkembang organisasi kebangsaan dengan membawakan ide-ide nasionalisme Indonesia. Dalam periodisasi sejarah Indonesia, periode tersebut masuk dalam sejarah pergerakan nasional, yang periodenya dari awal abad ke 20 sampai jatuhnya kekuasaan Hindia Belanda, menyusul zaman pendudukan jepang, dan revolusi kemerdekaan.

⁸ Disebut organisasi modern karena BU merupakan organisasi yang memiliki tujuan, anggaran dasar dan rumah tangga, dengan kepengurusan yang dipilih melalui konggres.

⁹ Kajian tentang Budi Utomo secara mendalam telah dilakukan oleh seorang sarjana (dan keturunan bangsawan) Jepang, Akira Nagazumi dengan judul, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Yeras of the Budi Utomo, 1908-1918*, diterbitkan oleh Institute of Developing Eaconomics, Tokyo, tahun 1972. Edisi Indonesianya diterjemahkan oleh sebuah tim yang dibentuk atas kerja sama diantara KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) bekerja sama

Berdirinya BU dilatarbelakangi oleh kegelisahan seorang dokter Jawa yang bernama Wahidin Sudirohusodo akan nasib pendidikan bangsa Indonesia khususnya Jawa. Wahidin berpendapat bahwa setiap bangsa Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat mengikuti pendidikan. Pendidikan hanya dinikmati oleh golongan tertentu, golongan elit priyayi, dan golongan orang-orang yang memiliki penghasilan tertentu. Di samping kesempatannya yang terbatas, biaya pendidikan waktu itu tidak memberikan ruang kepada bangsa Indonesia pada umumnya.¹⁰ Atas kegelisahannya sejak tahun 1906 Wahidin melakukan propaganda dan mengajak kalangan elit Indonesia untuk menghimpun dana pendidikan (*studiefonds*) bagi bangsa Indonesia.

Apa yang telah dilakukan Wahidin tersebut mendorong dokter Sutomo (kemudian dikenal sebagai pemimpin *studieclub* di Surabaya) untuk membentuk suatu organisasi yang diberi nama BU. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang harmonis bagi negeri dan bangsa, terutama kemajuan dalam bidang pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, dan kebudayaan. Sekitar lima bulan setelah berdiri, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1908 BU menyelenggarakan kongresnya yang pertama Yogyakarta dan memilih Bupati Karanganyar, R.T. Tirtokusumo sebagai ketua umumnya. Gerakan BU pada awal pendiriannya menggeliat begitu pesat, dengan anggota yang kebanyakan pegawai pemerintah dan bangsa Jawa. Pada akhir tahun 1909 BU telah memiliki 40 cabang dengan kurang lebih 10.000 anggota (Pringgodigdo, 1986: 1-2). Dari jumlah anggota BU yang begitu pesat, dapat dibayangkan betapa tingginya semangat berorganisasi pada masa itu.

BU merupakan organisasi yang penuh dinamika. Meskipun secara umum anggotanya adalah orang Jawa dan pegawai pemerintah atau yang disebut priyayi, namun di dalamnya muncul berbagai pandangan yang berbeda sebagai dinamika organisasi. Dinamika yang muncul antara lain adalah perdebatan apakah BU hanya untuk bangsa Jawa atau untuk bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Nusantara. Di kalangan kaum terpelajar dalam BU terjadi polarisasi karena perbedaan orientasi serta sikap terhadap modernisasi. Perbedaan orientasi yang menonjol terjadi antara kaum intelektual tradisional, yang diwakili oleh Radjiman Widiodiningrat, seorang dokter keraton Surakarta

dengan LIPI dan diterbitkan dengan judul, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* oleh Grafitipress pada tahun 1989

¹⁰ Jumlah siswa pribumi di sekolah dasar Eropa di Jawa dan Madura tahun 1908 berjumlah 2.668, termasuk 286 perempuan. Jumlah itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari penduduk pribumi waktu itu (lihat Nagazumu, catatan kaki no. 9)

berhadapan dengan kaum intelektual progresif yang diwakili oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang dokter yang bekerja di Demak, Jawa Tengah. Kongres pertama BU di Yogyakarta tersebut merupakan ajang konfrontasi antara keduanya. Konfrontasi yang terjadi bukan saja perdebatan antara konservatisme dengan progresivisme mengenai tujuan gerakan, tetapi bahasa yang digunakanpun menunjukkan adanya perbedaan yang tajam. Radjiman menggunakan bahasa Jawa, dan berpendapat bahwa bahasa Jawa harus menjadi bahasa organisasi, sedangkan Tjipto menggunakan bahasa Melayu dan berpendapat bahwa bahasa Melayu yang harus digunakan sebagai bahasa organisasi. Yang pertama menghendaki langkah gerakan secara bertahap untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan taraf pendidikan kaum pribumi dengan mengikuti arus yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan kelompok kedua menuntut tujuan gerakan tidak sampai di situ, tetapi pendobrakan terhadap masyarakat kolonial dan tradisional dengan segala kekolotan, statisme, dan diskriminatif. Untuk mencapai tujuannya tersebut kelompok kedua menuntut adanya gerakan politik yang bersifat radikal (Kartodirdjo, 1993: 103). Apa yang terjadi antara Radjiman dan Tjipto dapat dilihat sebagai bentuk demokrasi dalam organisasi seperti BU yang merupakan organisasi pegawai pemerintah pada waktu itu.

Di samping itu, BU juga bukanlah organisasi yang linier dalam hal orientasi. Walaupun pada awalnya BU bergerak dalam bidang peningkatan pendidikan dan kebudayaan, namun ia kemudian mengalami perubahan penting. Ketika *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibentuk pada tahun 1918 BU berubah menjadi organisasi politik yang memiliki wakil untuk duduk dalam Dewan tersebut. Adanya transisi pada sifat organisasi selama tahun-tahun itu mencerminkan daya upaya elit Jawa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial (Nagazumi, 1989: 7).¹¹

Berdirinya BU menginspirasi putra-putra daerah lainnya di Nusantara untuk mendirikan organisasi kedaerahan. Kalangan militer di kalangan dari putra Ambon membentuk organisasi yang diberinama Wilhelmina di Magelang pada tanggal 1 September 1908 dengan tujuan antara lain untuk memajukan pengajaran dan saling hidup rukun. Setahun kemudian dr. Tehupeiorry mendirikan *Ambonch Studiefonds* untuk menghimpun dana pendidikan bagi masyarakat Ambon. Di kalangan pegawai pemerintah lahir pula *Ambons Bond*. Orang-orang Minahasa juga tidak kalah dengan mendirikan Rukun Minahasa di

¹¹ Perubahan dan pergeseran elit tradisional oleh elit modern dalam birokrasi pemerintah Hindia Belanda dan juga setelah Indonesia merdeka dikaji secara detail oleh Sutherland.

Semarang (1912). Putra-putra dari Sumatra pun tidak ketinggalan dengan mendirikan Sarikat Sumatra di Jakarta.¹² Munculnya organisasi-organisasi kedaerahan semacam itu adalah pertumbuhan yang wajar sebagai tahap awal dalam proses integrasi (kartodirdjo, 1993: 105).

Selain organisasi kedaerahan, lahir pula organisasi yang cakupannya lebih luas dari organisasi yang disebutkan di atas. Organisasi tersebut antara lain adalah *Indische Vereeninging* (perhimpunan Hindia yang kemudian disebut IV) yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Seperti halnya BU yang sangat moderat terhadap pemerintah kolonial, IV pun pada awalnya merupakan organisasi moderat, bertujuan memajukan kepentingan umum rakyat Hindia Belanda di negeri Belanda, dan membina hubungan erat dengan Hindia Belanda (Ingleson 1993: 1).

Setelah itu, lahir organisasi yang berasaskan agama yaitu Serikat Islam (SI) pada tahun 1911.¹³ Jika BU dan IV sejak awal merupakan organisasi kaum elit, SI merupakan organisasi kerakyatan yang pertama yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan H.O.S Tjokroaminoto. Organisasi ini awalnya bernama Serikat dagang Islam berdasarkan koperasi dengan tujuan memajukan berdagangan bangsa Hindia di bawah panji-panji Islam. Untuk menunjukkan coraknya sebagai organisasi rakyat, SI menolak keanggotaan pegawai pemerintah atau pegawai pangreh praja. Dengan menggunakan bendera Islam, jumlah anggota SI jauh melampaui organisasi yang ada saat itu (Pringgodigdo, 1986: 5).

Organisasi lain yang keanggotaannya terbuka untuk seluruh bangsa Hindia adalah De Indische Partij (IP)¹⁴ yang didirikan oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat (kemudian dikenal Ki Hajar Dewantoro) di Bandung pada tahun 1911. Di samping sifatnya yang terbuka, IP merupakan organisasi yang pertama melontarkan isu kemerdekaan. Tujuan IP adalah Indie merdeka dengan dasar “national indische”. Dengan semboyan Indie untuk bangsa Indiers, IP berusaha membangunkan rasa cinta tanah air bagi bangsa Indiers melalui kerja sama

¹² Organisasi-organisasi kedaerahan ini yang kemudian mensponsori berdirinya organisasi pemuda ke daerah seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes, dan semacamnya pada tahun-tahun antara 1915-1920.

¹³ Bagaimana perkembangan organisasi berwawasan Islam di Indonesia pada masa pergerakan dan zaman Jepang, dapat dilihat pada buku H. J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

¹⁴ Organisasi ini semula bernama Insulinde, didirikan di Bandung tahun 1911 oleh Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda.

yang erat untuk memajukan tanah air dan menyiapkan kemerdekaan (Pringgodigdo, 1986: 12).¹⁵

Apa yang diperjuangkan oleh IP, dan gerakan nasionalisme di berbagai negara lainnya mendorong mahasiswa Indonesia di Belanda yang tergabung dalam IV mengalihkan haluan politiknya dari yang semula moderat menjadi lebih radikal. Haluan politik IV menjadi lebih jelas, yaitu Hindia Bebas dari Belanda (*Indie los van Nederland*) dan pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Sebagai corong organisasi, IV menerbitkan majalah yang diberi nama *Hindia Poetra*.

Kedatangan putra-putra Hindia di Belanda baik karena sekolah seperti Hatta, Sartono, Ali Sastroamidjojo, Iwa Kusumasumantri, J.B. Sitanala, Darmawan Mangunkusumo, maupun karena buangan politik seperti Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surianingrat, dan Douwes Dekker menambah tenaga gerakan IV. Para pendatang baru ini dengan cepat mendominasi gerakan IV, yang kemudian secara bergantian menjadi pemimpin IV.

Memasuki dasawarsa kedua abad ke 20 kebangkitan gerakan nasionalis memasuki babak baru, dengan mulai merumuskan konsep nasionalisme Indonesia. Manifesto politik yang dikumandangkan oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 menunjukkan bahwa gerakan nasionalis semakin jelas merumuskan arahnya. Di dalam manifesto tersebut tercakup prinsip-prinsip nasionalisme seperti kebebasan atau kemerdekaan, kesatuan, dan kesamaan (Kartodirdjo, 1993: xi).

Meskipun mereka berasal dari suku bangsa dan agama yang berbeda, di negeri Belanda mereka merasa satu bangsa.¹⁶ Kesadaran ke-Indonesiaan pun menjadi semakin menguat. Kata “Indonesia” sebagai satu entitas bangsa semakin terasa. Semangat keIndonesiaan semakin jelas setelah Iwa kusumasumnatri memimpin IV. Sebagai ketua baru IV, pada awal Januari 1923 Iwa menjelaskan bahwa organisasinya sudah dibenahi dengan tekanan perjuangan pada tiga hal, yaitu pertama, Indonesia ingin menentukan nasib

¹⁵ Karena Anggaran dasar dan Rumah Tangganya yang dianggap radikal oleh pemerintah kolonial, maka tokoh-tokoh IP ditangkap oleh pemerintah. Organisasi ini pun tidak berkembang pesat. Meskipun demikian, IP telah mampu menarik hati sebagian anggota BU yang memiliki pemikiran radikal seperti Tjipto Mangunkusumo.

¹⁶ Sebagai gambaran asal mereka: Hatta, lahir di Bukit Tinggi Sumatra Barat, pernah aktif di Jong Sumatra sebelum berangkat ke Belanda menjadi mahasiswa di Handels Hoogeschool, Rotterdam. Iwa lahir di Ciarnis, Jawa Barat, kemudian mengambil studi hukum di Universitas Leiden. Sitanala lahir di Ambon, dan mengambil kedokteran di Universitas Amsterdam. Darmawan lahir di Kudus, Jawa Tengah, mengambil jurusan teknik di Delf (lihat Ingleson, catatan kaki no. 13 hlm. 6).

sendiri; kedua, untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; ketiga, seluruh bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan Belanda. Sebagai ketua IV, Iwapun menyerukan agar para mahasiswa di Belanda terus mengikuti perkembangan politik di tanah air, dan untuk cepat mencapai ketiga tujuan perjuangan, Iwa meminta agar semua kelompok bangsa Indonesia bersatu dalam perjuangan bersama melawan Belanda. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi ketua IV, Iwa menyatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak pada kelembagaan dan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam artian yang sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing (Ingleson, 1993: 6-7).

Kegiatan politik IV untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin jelas dengan mengubah nama IV menjadi *Indonesische Vereeniging*¹⁷ (Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI) pada tahun 1924, dan mengubah nama majalahnya dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Merekapun menyatakan diri bukan sebagai bangsa Hindia, tetapi sebagai bangsa Indonesia. Dalam kata pengantar edisi pertama *Indonesia Merdeka* dinyatakan bahwa kata “merdeka” terkandung ungkapan tentang tujuan usaha keras bangsa Indonesia. Mulai saat itu, mereka pun menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” menjadi semboyan pemuda Indonesia. Dengan menggunakan nama “Indonesia” mereka tidak mau lagi disebut sebagai bangsa Hindia.

Menurut Ingleson, IV adalah satu organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan segera dan tidak bersyarat. Radikalisme pemuda nasionalis Indonesia ini oleh Ingleson dilihat sebagai refleksi dari gerakan nasionalis Indonesia yang sampai saat itu belum berhasil mengadakan dialog dengan pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan mereka yang radikal dapat dilihat pula dari artikel-artikel yang diterbitkan melalui *Indonesia Merdeka*. Sebuah artikel yang terbit pada Februari 1925, misalnya diberi judul, *Trijd aan*

¹⁷ PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia pada tahun 1922, kemudian diikuti oleh Soetomo yang menggunakan organisasinya dengan nama *Indonesische Studie Club* tahun 1924. Sukarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Nama Indonesia sendiri awalnya populer di kalangan akademisi. Pertama kali dikemukakan oleh George Samuel Windsor Earl, Etnolog Inggris pada artikelnya yang dimuat dalam *Jurnal of The Indian Archipelago and Eastern Asia* Vol. IV tahun 1850 dengan nama Indonesia. Pada yang sama dan volume yang sama, James Ricahardson Logan mengganti huruf u dan Indunesiannya Earl menjadi Indonesia. Kemudian pada tahun 1884 Adolf Bastian, seorang ahli etnologi di Universitas Berlin menerbitkan buku yang diberi judul *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel* sebanyak lima volume (www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah_nama_Indonesia)

Twee Front (perjuangan di dua front) menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia akan lebih berat dan lebih pahit tetapi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia harus bersedia mengorbankan semua daya dan kepandaiannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan bukan hanya satu front, tetapi sekaligus dua front, karena perjuangan mereka tidak hanya melawan pemerintah Belanda, tetapi juga bangsa Indonesia sendiri yang menentang perjuangan kaum nasionalis (Ingleson, 1993: 9, 11).

Sumpah Pemuda sebagai Perwujudan Komitmen Kebangsaan

Apa yang diperjuangkan oleh para anggota PI di Belanda, disambut oleh organisasi-organisasi kebangsaan di Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda di Indonesia sejak awal tahun 1920-an mulai intens mengadakan berbagai pertemuan untuk menyatukan langkah guna terwujudnya kemajuan bangsa. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, intensitas hubungan dan keterkaitan satu organisasi dengan organisasi lainnya semakin tinggi. Hal inilah yang mempertebal semangat persatuan dan semangat kebangsaan bagi tokoh-tokoh pemuda waktu itu. Dari risalah kongres beberapa organisasi pemuda waktu itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ismaite Bond, Jong Batak, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), tampak adanya hasrat untuk bersatu. Dari semangat untuk bersatu tersebut, lahirlah gagasan untuk menggelar kongres akbar pemuda Indonesia (Kerapatan Besar Pemuda).¹⁸ Kongres yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Indonesia I diadakan pada 26 April 1926. Dalam sambutannya sebagai ketua Panitia, M. Tabrani mengatakan "... kita semua orang-orang Jawa, Sumatra, Minahasa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah dijadikan makhluk yang harus saling mengulur tangan, bilamana kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kemerdekaan Indonesia, tanah air yang kita cintai..." (Yayasan Sumpah Pemuda, 1984: 60).

Dari Kongres Pemuda Indonesia I, para pemuda terus menggalang persatuan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Salah satu pertemuan yang perlu dicatat dalam sejarah Indonesia adalah pertemuan tanggal 23 April 1927 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Jong Java, JSB, Jong Batak, Jong

¹⁸ Pada tanggal 15 November 1925 terbentuklah panitia kongres yang di Tabrani (Jong Java), dengan anggota antara lain Bahder Djohan (JSB), Jan Toule Soulehuway (Jong Ambon) Paul Pinontoan (Jong Minahasa), dan Sanusi Pane (Jong Batak). Lihat Yayasan Sumpah Pemuda, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kuningan Esa, 1984.

Ambon, Jong Minahasa, Pemuda Indonesia, PPPI yang menghasilkan deklarasi bersama bahwa:

1. Cita-cita Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita semua putra Indonesia,
2. Semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menuju penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal (Yayasan Sumpah Pemuda, 1984).

Apa yang mereka perjuangkan adalah wujud dari perlawanan melawan penjajah. Hasrat dan keinginan yang kuat untuk merdeka mendorong terus menguatnya rasa persatuan. Melalui persatuan mereka dapat mewujudkan komitmennya sebagai anak bangsa dalam upaya membentuk satu bangsa yang merdeka.

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan hal yang mudah. Dalam sejarah Indonesia, periode ini adalah periode represif. Pemerintah kolonial mengambil tindakan keras terhadap pemimpin organisasi yang nonkooperatif. Meskipun demikian, tindakan keras yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan lainnya tidak menyurutkan semangat gerakan anti kolonial. Semakin represif tindakan pemerintah, semakin menggelora pula tuntutan untuk merdeka. Gerakan-gerakan nonkooperatif (tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial) semakin lantang menyuarakan persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka adalah orang-orang terdidik yang seharusnya menikmati pekerjaan enak di kantor-kantor pemerintah atau swasta Eropa dengan gaji besar, tetapi lebih memilih bergerak melawan pemerintahan kolonial.

Setelah kongres Pemuda Indonesia pertama berjalan dengan sukses mereka terus melakukan pertemuan dalam upaya menyatukan seluruh organisasi pemuda yang ada dan menyatukan langkah untuk melawan penjajah. Hasil konkret pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya kongres Pemuda Indonesia ke 2 yang pada tanggal 28 Oktober 1928 berhasil mengeluarkan ikrar bersama yang kita kenal sekarang dengan Sumpah Pemuda.

Saya percaya bahwa teks sumpah pemuda sudah kita hafal. Karena itu, di sini saya hanya menyampaikan bagian dari alinea penutup keputusan Kongres Pemuda Indonesia ke 2, yang memiliki makna penting tetapi tidak banyak diketahui. Penggalan alinea tersebut berbunyi: "...mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persatoeannya: kemaoean, sejarah, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean..." Teks ini dikutip karena saya ingin menggarisbawahi kata "kemauan". Persatuan bangsa Indonesia ini terwujud karena adanya persamaan "kemauan" yang kuat, persamaan sejarah, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Perasaan

persamaan satu bangsa, tanah air, dan bahasa tersebut kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menyiapkan Indonesia merdeka.

Kemauan yang tinggi tersebut telah mereka perjuangkan dengan menghantarkan bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Ketika pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Jepang, gerakan pemuda dan mahasiswa ada yang bergerak dalam bentuk gerakan bawah tanah yang tidak bekerja sama dengan pemerintahan Jepang seperti Sutan Syahrir, ada juga yang bekerja sama secara terbuka dan masuk dalam jajaran pemerintahan Jepang seperti Sukarno dan Hatta.¹⁹ Meskipun demikian mereka selalu berkomunikasi. Jepang memang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI, tetapi kejatuhan Jepang yang begitu cepat oleh Sekutu, membuat nasib yang berada dari skenario yang ada. Dalam hitungan jam setelah kejatuhan Jepang, para pemuda berhasil mendesak Sukarno dan Hatta untuk memproklamkan kemerdekaan di luar skenario PPKI. Atas desakan pemuda itulah Indonesia tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu dari lima negara yang merdeka atas perjuangan sendiri (melalui perjuangan yang heroik), bukan karena pemberian penguasa penjajah.

Nilai-nilai Kebangkitan Nasional

Sejarah memang tidak berulang. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap langkah dan peristiwa masa lampau dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kita dan yang akan datang.²⁰ Tokoh-tokoh dan para pendiri bangsa

¹⁹ Dalam beberapa sumber dinyatakan ada kesepakatan di antara mereka untuk membagi front gerakan. Sukarno dan Hatta setelah kembali dari pengasingan akan bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari tekanan yang frontal dari pemerintahan militer Jepang, sedangkan Syahrir bergerak di bawah tanah, dengan memberikan pendidikan politik kepada pelajar dan pemuda Indonesia di kota-kota besar. Meskipun demikian, mereka juga sepakat untuk terus menggalang perjuangan. Lihat J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peran Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti, 2003.

²⁰ Dalam Wikipedia disebutkan bahwa nilai adalah konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah. Dengan demikian nilai sosial merupakan seperangkat pemahaman yang dianut oleh masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Untuk menentukan apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk, pantas atau tidak pantas dari dilakukan melalui proses menimbang. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut suatu masyarakat. Budaya suatu masyarakat merupakan suatu rangkaian sistem nilai yang membentuk suatu watak dan karakter masyarakat. Budaya diperoleh melalui proses belajar. Setiap orang tumbuh melalui proses sosialisasi sistem nilai yang kemudian terinternalisasi dalam setiap individu. Dengan demikian, nilai dapat dijadikan norma atau patokan bagi seseorang untuk

Indonesia telah berhasil menggali nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, dari mulai kerajaan-kerajaan nusantara hingga terbentuknya suatu kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang diperoleh dari hasil renungan atas keteladan bangsa Indonesia itu mentransenden dalam pemikiran para pendiri bangsa. Renungan yang tertransenden tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 itu disebut nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang harus dijaga, dilestarikan, dan dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Demikian juga dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada periode kebangkitan nasional yang meliputi dasawarsa pertama dan kedua abad ke 20. Semangat, kemauan, dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan oleh tokoh-tokoh pergerakan dapat dijadikan contoh, pijakan, dan arahan bagi kita dalam melakukan langkah-langkah pembangunan saat ini dan ke depan. Pemahaman, penghayatan, dan pemaknaan kebangkitan nasional yang utama adalah jiwa nasionalisme dan patriotisme (Sutarno (2008: 30-32). Nilai-nilai yang dapat diambil dari sejarah kebangkitan nasional menjadi beberapa nilai berikut:²¹

1. Kebangsaan. Sikap politik dan sosial dari sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, wilayah, cita-cita, tujuan, dan hasrat bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsanya. Nilai tersebut jelas terlihat dari artikel-artikel yang diterbitkan melalui berbagai media, dokumentasi hasil rapat-rapat organisasi kepemudaan dan organisasi politik yang ada pada waktu itu yang menggambarkan perlunya persatuan dalam membentuk satu bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Nation Indonesia tidak terbentuk oleh kesamaan kelahiran, asal-usul, ras, kedaerahan, tetapi didasarkan atas persamaan perasaan kebangsaan, cita-cita kebangsaan, dan persamaan kemauan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
2. Persatuan. Hasrat dan kemauan yang kuat menyatukan diri untuk tujuan mulia. Nilai ini tumbuh dari adanya kemauan dan tekad yang kuat untuk

berperilaku dalam masyarakat. Nilai merupakan petunjuk umum mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial.

²¹ Beberapa sejarawan dari UI, Pusat Sejarah TNI, dan saya sendiri serta beberapa sejawaran lainnya dalam kegiatan yang dibiayai Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) merumuskan ada sembilan nilai sejarah perjuangan bangsa meliputi nilai-nilai: kebangsaan, persatuan, patriotisme, kepahlawanan, pantang menyerah, percaya diri, solidaritas, toleransi, dan saling percaya. Di sini saya sekaligus minta izin kepada guru, dan sejawat dalam pemuatan atau pengutipan pada tulisan ini.

menyatukan diri sebagai bangsa Indonesia guna mewujudkan negara yang merdeka. Sumpah pemuda mengajarkan bahwa kemerdekaan sebagai manifestasi kesadaran kebangsaan, terwujud karena adanya persatuan yang kuat. Persatuan hendaknya tidak dilihat dari penyamaan atau penyeragaman, tetapi harus dilihat dan dimaknai dalam konteks bhineka tunggal ika.

3. Patriotisme. Patriotisme lahir dari menguatnya rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, dan kerelaan berkorban untuk mempertahankan dan melindungi tanah air. Tokoh-tokoh pergerakan merupakan segelintir orang Indonesia yang seharusnya menikmati berbagai keistimewaan, tetapi mereka memilih untuk berjuang demi bangsanya. Mereka menghadapi tekanan, bukan hanya diri mereka, tetapi juga keluarganya. Tidak sedikit dari mereka yang orang tuanya kehilangan jabatannya di kantor pemerintah akibat sikap politiknya.
4. Pantang menyerah. Adanya semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan dan berani menghadapi segala tantangan. Karena sikap politiknya orang-orang seperti Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, Sukarno, Hatta harus hidup di pengasingan. Di tempat-tempat pengasingan mereka terus memperjuangkan Indonesia merdeka.
5. Nilai saling percaya. Terbentuknya negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat terwujud dari adanya saling percaya dari segenap anak bangsa yang berasal dari berbagai daerah, etnis, agama, dan budaya dalam berjuang bersama membangun bangsa tanpa merasa dikhianati oleh kelompok lain.
6. Nilai percaya diri. Indonesia merdeka karena adanya rasa percaya diri dari segenap anak bangsa bahwa bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari negara kolonial tanpa bantuan orang asing. Mereka percaya bahwa bangsa yang merdeka akan dapat mewujudkan impiannya membangun bangsa Indonesia menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
7. Nilai toleransi dan kejujuran. Nilai ini dapat diambil dari sikap para pendiri bangsa yang tidak menampilkan ego masing-masing, termasuk ego tentang kebesaran etnis, kebesaran agama, dan ego tentang kebesaran budaya. Mereka saling menghargai, saling mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan gagasan, ide, guna mencapai suatu kesepakatan dalam merumuskan dasar-dasar negara.

Nilai-nilai luhur tersebut harus terus ditanamkan dalam proses pembangunan bangsa melalui pendidikan formal, pendidikan politik, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya terhadap setiap warga masyarakat.

Nilai-nilai luhur tersebut juga seharusnya dapat menggerakkan segenap warga negara Indonesia dalam mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

Peran Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mentransformasi nilai-nilai luhur dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkarakter mewarisi nilai-nilai perjuangan. Melalui pendidikan, para pejuang bangsa dapat membaca perkembangan gerakan nasionalisme di berbagai belahan dunia. Melalui pendidikan, mereka juga dapat menggali sejarah bangsanya sendiri sehingga mengetahui kebesaran bangsa Indonesia pada masa lampau tetapi hancur karena kolonialisme.

Gerakan kebangsaan sebagai kebangkitan nasional digerakkan oleh kelompok intelektual dan intelegensia²² yang memahami nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia di masa lampau. Semangat perjuangan digali dari gerakan nasionalisme yang tumbuh di negara-negara dunia ketiga pada waktu itu, dan nilai-nilai tradisi yang digali dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang menginspirasi perjuangan kaum nasionalis Indonesia paling tidak muncul dari tiga pengalaman. Pertama kesadaran bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami kemajuan pada masa kerajaan-kerajaan nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram di Nusantara telah mengalami kemajuan yang sejajar dengan kerjaan maju di belahan dunia lainnya pada jamannya. Kedua, karena feodalisme dan kolonialisme bangsa Indonesia mengalami kemunduran yang paling dalam. Jaman kejayaan yang membanggakan tenggelam oleh eksploitasi penjajah. Kekayaan alam dikeruk dan dibawa ke negara penjajah, sementara itu anak bangsa yang bekerja keras untuk menggali sumber-sumber alam, tidak dapat memanfaatkan hasilnya. Sebagian besar hasil pertanian, hasil tambang, dan hasil bumi lainnya tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia tetapi dikirim ke negara induk penjajah. Ketiga, karena feodalisme dan penjajahan tersebut, maka terjadi stratifikasi sosial, telah terjadi pengkelasan yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kelas sosial yang paling bawah, sebagai *indlander*, dan pribumi yang disteriotipkan sebagai bangsa pemalas, bodoh, dan miskin.

Ketiga pengalaman tersebut telah menyadarkan para pendiri bangsa, yang merupakan kelompok kecil dari kalangan intelektual yang muncul pada awal

²² Alatas mengartikan intelektual sebagai orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah non material dengan menggunakan kemampuan penalarannya. Alatas membedakan pengertian intelegensia dengan intelektual. Kaum intelegensia menurut Alatas adalah kaum kaum terdidik yang mengalami pendidikan tinggi formal dan modern. Lihat Alatas, *Intelektual Masyarakat Berkembang*, Jakarta: LP3ES, 1988.

abad ke-20. Mereka adalah tokoh pergerakan, generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan modern. Mereka putra bangsa Indonesia terpilih dari berbagai etnis, daerah, dan suku bangsa yang bertemu dalam entitas akademik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Karena pendidikan yang mereka peroleh, lahir kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan bangsa yang selama ini terjajah. Mereka juga menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia terjadi karena eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial.

Melalui penggalian sejarah bangsanya yang mereka lakukan, mereka mengetahui pula bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan yang heroik dalam melawan eksploitasi kolonial, tetapi selalu dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial karena gerakannya bersifat lokal. Pengetahuan tersebut telah menyadarkan perlunya kesatuan. Karena kesadaran tersebut, lahirlah organisasi-organisasi pemuda yang terdidik yang mengelola organisasinya dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Meskipun pada awalnya organisasi mereka merupakan organisasi kedaerahan, namun mereka memiliki visi yang sama yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari situlah lahir kesadaran anak negeri sebagai sebuah *nation* yang kemudian disebut Indonesia.

Puncak kesadaran sebagai sebuah *nation* ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada saat itu, pemuda dan pemudi bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, etnis, dan suku bangsa menyatakan komitmennya dengan mengikrarkan diri sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang bernama Indonesia.

Sebagai generasi mudah yang terdidik, cerdas, dan visioner, mereka memilih untuk berjuang dengan berbagai pengorbanan guna memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan sebagai bentuk pengkaderan rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan segala pengorbanannya mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan guna memberikan pendidikan anak negeri di luar pendidikan yang diselenggarakan pemerintahan kolonial. Karena itulah lahir Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro di Yogyakarta, Pendidikan Kayu Taman yang didirikan oleh Muhammad Syafei di Sumatra Barat, sekolah Muhammadiyah di Surakarta, sekolah guru yang didirikan oleh van Lith di Muntilan, Jawa Tengah (Silalahi, 1995:10). Dengan segala kemampuannya mereka memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia guna membangkitkan semangat perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Lembaga-lembaga pendidikan ini di samping melahirkan kelas baru juga sebagai tempat pengkaderan tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Penutup

Sebagai penutup, saya akan kembali ke pernyataan Ernest Renan, bahwa sebuah bangsa terbentuk bukan karena adanya kesamaan bahasa, kesamaan suku bangsa, kesamaan geografi, atau kesamaan sejarah. Sebuah bangsa terbentuk karena adanya kesatuan kemauan, kesatuan solidaritas, kesatuan dari orang-orang yang memiliki kesetiakawanan satu dengan yang lain. Sebuah bangsa adalah suatu kesatuan jiwa, suatu kesatuan spiritual, suatu kesatuan solidaritas besar yang tercipta oleh pengorbanan pada masa lampau, dan kesiapan untuk berkorban pada masa yang akan datang. Para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan para pendiri bangsa sangat paham apa yang dikatakan oleh Renan. Itu jelas terlihat dari rangkuman naskah Sumpah Pemuda.

Suasana zaman sekarang jauh berbeda dengan ketika bangsa Indonesia bergerak melawan kolonialisme. Globalisasi dan hedonisme telah menggerogoti semangat perjuangan dengan nilai-nilai perjuangannya yang diwariskan kepada generasi kita. Nilai-nilai persatuan, patriotisme, solidaritas, saling percaya, saling menghargai, dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran dirasakan semakin mengendor. Berita-berita di media massa selalu menyajikan berita-berita horor, perkelahian pelajar, tawuran antarkelompok, pemaksaan kehendak dari yang mayoritas terhadap minoritas, dari yang kuat terhadap yang lemah yang disajikan melebihi kenyataan yang sebenarnya (*hyperrealis*). Berita-berita semacam itu lambat laun dapat membentuk nilai tersendiri bagi generasi kita ke depan.

Di sini saya ingatkan lagi bahwa para pendiri bangsa telah menghantarkan kita ke gerbang pintu kemerdekaan. Kini pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia telah terbuka lebar. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai insan terdidik kita juga memiliki tanggung jawab untuk selalu mengaktualisasi nilai-nilai perjuangan yang dijadikan landasan untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai tersebut dapat ditransfer melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Sekian, dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pondok Cabe, 2 April 2013

Daftar Pustaka

- Alatas, S.H. (1988). *Intelektual Masyarakat Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Anderson, B. (1972). *Java in a Time of Revolution, Occupation, and Resistance. 1944-1946*. Itaca: Cornell University Press
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Blackburn, S. (2011). *Sejarah 400 Tahun Jakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Ingleson, J. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Kahin, J. McT. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Legge, J.D. (2003). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.
- Locher-Scholten, E. (1981). *Ethiek in Fragmenten, Vijf Studies over Koloniaal Denken an doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942*. Utrecht: HES Publishers
- Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Grafitipress
- Niel, Robert Van. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Haag: Uitgeverij W. Van Hoeve

Poeponegoro, J., Notosusanto, N. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia* Jld V: Jakarta: Balai Pustaka

Silalahi, H.T. (1995). "Kebangkitan Nasional I: Menemukan, Menumbuhkan, dan Mengaktualisasikan Kebangsaan" dalam Bandoro, Bantaro (Ed), *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: SCIS.

Sutarno_NS. (2008). *1 Abad Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto

Sutherland, H. (1979). *The Making of a Bureaucratic Elite*. Singapore; Heinemann Educational Books

Yayasan Sumpah pemuda. (1984). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kunia Esa.

www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah_nama_Indonesia